

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ini berlokasi di Jalan KH. Wachid Hasyim No 2 Karanganyar. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Sebelum menjadi Badan Keuangan Daerah, kantor pemerintahan ini bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 2 Tahun 2009 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Karanganyar. Setelah menjadi Badan Keuangan Daerah terjadi penambahan satu Sub Bidang di Bidang Aset Daerah.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana sebagai penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan khususnya di daerah. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan
- c. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak
- d. Bidang Anggaran
- e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- f. Bidang Akuntansi
- g. Bidang Aset Daerah

Badan Keuangan Daerah ini memiliki tujuan untuk menjadikan perencanaan anggaran keuangan daerah merupakan program daerah yang prospektif dan realistik untuk dilaksanakan (www.bkd.karanganyar.go.id), dengan cara :

- a. Meningkatkan upaya perbaikan terhadap mutu pelayanan dibidang keuangan daerah.
- b. Menjadikan mutu pertanggung jawaban anggaran daerah sebagai suatu bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan.
- c. Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang keuangan.

3.1.1 Visi dan Misi BKUD Kabupaten Karanganyar

A. Visi

Menjadikan badan yang profesional dan akuntabel di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

B. Misi

1. Mewujudkan aparatur yang profesional dan kompeten dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pendataan, pengolahan dan penetapan pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
3. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4. Mewujudkan sistem penganggaran dengan penggunaan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
5. Mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
6. Mewujudkan informasi dan laporan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

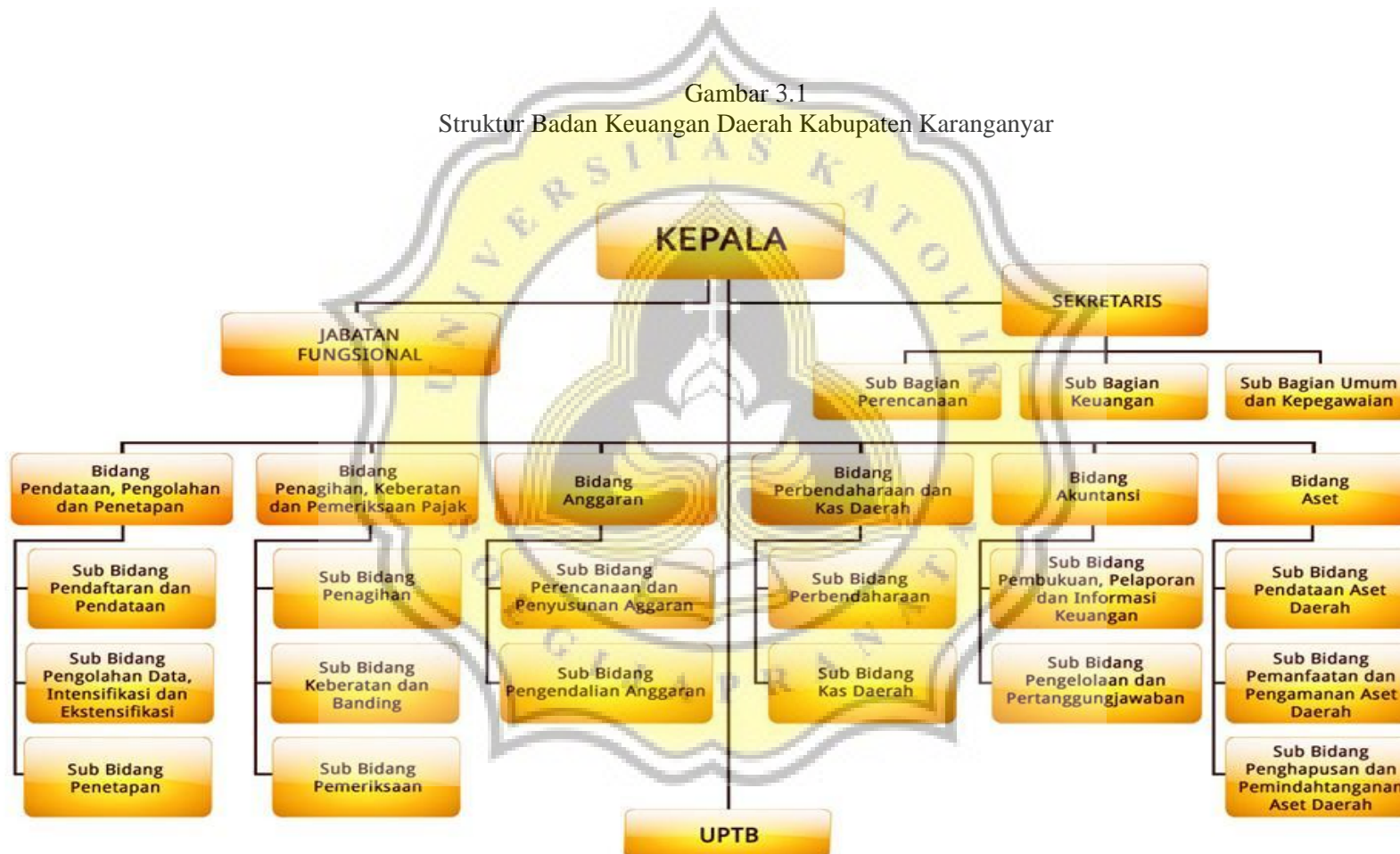
7. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, informatif dan akuntabel.

Sumber : www.bkd.karanganyar.go.id.



3.1.2 Struktur Organisasi BKUD Kabupaten Karanganyar

Gambar 3.1
Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar



3.2 Metodologi Penulisan

3.2.1 Jenis Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder sehingga dapat membantu menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pegawai terkait Pajak BPHTB berupa wawancara tentang perkembangan harga dan objek Pajak BPHTB yang tiap tahunnya dapat mengalami peningkatan atau penurunan dan peran serta Pajak BPHTB terhadap penerimaan daerah. Wawancara tersebut ditujukan kepada Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Penetapan, Kepala Sub.Bidang Pemeriksaan dan pegawai yang bertugas di bagian pelayanan Pajak BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- b. Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut oleh kantor dan disajikan oleh pengumpul data primer atau orang lain. Data sekunder tersebut berupa Peraturan Daerah, Perundang-undangan terkait Pajak BPHTB, Target Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2013 – 2017, Realisasi Pajak BPHTB tahun 2013 – 2017, dan data yang berasal dari sumber resmi yang disajikan dalam bentuk *file excel* dan *pdf* yang didapat dari sumber rekapan dari

bidang akuntansi, sub.bidang pembukuan pelaporan dan informasi keuangan.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini yaitu melalui metode :

1. Metode Wawancara

Pada metode ini, penulis melakukan proses wawancara kepada Kepala Sub. Bidang Pemeriksaan Bapak Dheny Hendrawan, STP.,S.E., M.M. dan pegawai yang bertugas di bagian pelayanan Pajak BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, wawancara tersebut membahas perkembangan harga dan objek Pajak BPHTB yang tiap tahunnya dapat mengalami peningkatan atau penurunan serta peran serta Pajak BPHTB.

2. Objek, lokasi dan sampel

Pada metode ini diperoleh data dengan mengambil data keuangan Pajak BPHTB, data target dan realisasi pajak daerah tahun 2013 – 2017, serta realisasi Pajak BPHTB tahun anggaran 2013 – 2017.

3.3.3 Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh akan di analisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yakni tentang faktor distribusi pajak daerah khususnya Pajak BPHTB yang setiap tahunnya (2013 – 2017) dapat mengalami peningkatan, penurunan dan kendala yang terjadi dalam pemeriksaan baik di lapangan maupun di kantor serta tentang penerimaan pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kasus ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang berdasarkan data yang bersifat kualitatif tetapi juga didukung dengan data kuantitatif.

Dalam menganalisa data, peneliti akan menyajikan data dengan cara memaparkan hasil wawancara, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk mempermudah penyajian data kualitatif yaitu pemaparan, seperti data jawaban yang di peroleh. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan metode kuantitatif, yang hasil pengolahannya akan terwujud dalam bentuk teks paragraf (narasi).

Data sekunder diperoleh langsung dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, data sekunder ini berupa *file* yaitu mengenai data penerimaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar, data penerimaan pajak daerah, data nilai tanah setiap kecamatan, serta

data data wajib pajak dalam beberapa tahun (2013 – 2017). Data-data ini akan diolah menggunakan rumus atau cara perhitungan yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam penyelesaian pada studi kasus ini yaitu Proyeksi Penerimaan Pajak BPHTB Lima Tahun Ke Depan di Kabupaten Karanganyar, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Menghitung Pajak BPHTB

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

Keterangan :

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ Bangunan.

5% : Tarif BPHTB menurut Perda No. 14 tahun 2010.

NPOP : Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi).

NPOPTKP : Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak .

*) Untuk setiap wajib pajak Rp 60.000.000,00 dan untuk hibah, waris dan wasit Rp 300.000.000,00.

2. Menghitung Tingkat Capaian Distribusi Pajak BPHTB

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB}}{\text{Target Penerimaan Pajak BPHTB}} \times 100\%$$

3. Menghitung Kontribusi Pajak BPHTB terhadap Pajak Daerah

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Realisasi Pajak BPHTB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

4. Menghitung Proyeksi

Perhitungan proyeksi Pajak BPHTB tahun 2018 - 2022 menggunakan rumus yang dianjurkan Komalig 2014.

$$P = (PBPHBt \times r) + PBPHB$$

Keterangan :

P : Proyeksi

PBPHB : Realisasi Pajak BPHTB tahun sebelumnya

r : Rata-rata pertumbuhan lima tahun sebelumnya

